

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian permasalahan Pengawasan Pimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Handoko adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak telah melaksanakan proses pengawasan yang pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tujuan yang jelas dan telah ditetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pengawasan kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil dan yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan pengawasan tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Melihat dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak dapat disimpulkan cukup baik dilihat dari adanya kejelasan terkait bentuk, waktu dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengukuran pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengukuran pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak yang dilakukan berdasarkan pengamatan (*observasi*) dan laporan-laporan (*reports*). Pengamatan dilakukan oleh Pimpinan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur untuk melihat sejauh mana para pegawai melaksanakan tugas dan mematuhi aturan disiplin kerja pegawai negeri sipil.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan pimpinan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak kurang maksimal tetapi pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan juga telah dilaksanakan dengan menerapkan sistem evaluasi kerja yang biasanya dilakukan di hari senin. Evaluasi yang direncanakan akan dilakukan setiap seminggu sekali di hari senin ini pun juga tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan.

Kedisiplinan kerja pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilihat dari masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai seperti pegawai yang memanipulasi data absensi, pegawai yang tidak menggunakan atribut kerja lengkap, masih adanya pegawai yang terlambat masuk kantor, waktu istirahat yang diperpanjang tidak sesuai jamnya, pegawai yang terlambat apel pagi, dan masih terlihat pegawai yang bersantai-santai di waktu jam kantor.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Melihat dari pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada Bab V, dapat diketahui bahwa belum optimalnya tindakan koreksi yang dilakukan oleh pimpinan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Masih diterapkannya hukum kekeluargaan yang membuat hingga saat ini masih adanya pegawai yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang sudah ada dan didukung oleh pimpinan yang jarang berada ditempat membuat pengawasan pimpinan di dinas ini tidak jarang longgar.

6.2 Saran

Setelah mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis akan memberikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, guna tercapainya proses pengawasan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, pimpinan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak hendaknya menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi para pegawainya dengan rajin datang lebih awal atau tepat waktu pada saat masuk kerja sehingga pegawai yang lain mencontoh apa yang dilakukan pimpinan. Hal ini juga dilakukan untuk dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai.

2. Untuk menghindari pelanggaran yang sering dilakukan oleh pegawai, pimpinan harus menerapkan pengawasan langsung untuk mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan para pegawai bukan hanya dengan melakukan pengawasan tidak langsung dengan melihat laporan-laporan yang diberikan dan juga pimpinan harus secara teratur dalam melakukan tindakan evaluasi kerja guna meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai.
3. Pimpinan tidak lagi melakukan pembiaran terhadap pegawai ketika didapati pegawai tersebut melakukan pelanggaran kerja. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh para pegawai seperti pegawai yang tidak ada dikantor padahal sudah melakukan absensi dan pegawai yang menyepelekan penggunaan atribut kerja seperti papan nama atau tanda pengenal.
4. Tidak ada lagi penerapan hukum kekeluargaan yang dilakukan terhadap para pegawai yang melakukan kesalahan. Pimpinan harus bijak dan tegas untuk menindaklanjuti kesalahan yang dilakukan pegawai. Pemberian sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pegawai dapat memberikan efek jera kepada para pegawai.
5. Pimpinan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran kerja yang tinggi pada diri para pegawai dengan cara selalu memberikan dukungan kerja kepada setiap pegawai sehingga kedepannya para pegawai dapat royal terhadap pekerjaannya dan tidak mementingkan urusan pribadi dan lebih mementingkan urusan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Perlunya kesadaran kerja yang tinggi pada diri para pegawai sehingga nantinya pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan kerja yang tinggi. Hal ini juga akan membuat para pegawai lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul penelitian Pengawasan Pimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Hal yang menjadi kekurangan penulis dalam menganalisis dan menggambarkan hasil penelitian di lapangan dikarenakan masih minimnya pengetahuan peneliti tentang tata cara penelitian ilmiah yang baik dan benar.

Selama peneliti melakukan penelitian ini, peneliti menemukan kendala yang sedikit menghambat pelaksanaan penelitian. Adapun hambatan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kurang kooperatifnya narasumber yang menjadi subjek penelitian dalam memberikan informasi juga menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh penulis dikarenakan sulitnya menggali lebih dalam informasi yang peneliti butuhkan, sehingga di dalam penelitian ini masih ada beberapa hal yang belum dapat dipaparkan secara mendalam.

2. Kurangnya keterampilan penulis dalam menganalisis secara ilmiah, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kurang luas dan mendalamnya pemaparan yang dikemukakan dalam penelitian ini.